



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	13 (<i>tiga belas</i>)
Tahun Sidang	:	2019-2020
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Direktur Utama Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir/LPDB-KUMKM
Hari, Tanggal	:	Rabu, 22 April 2020
Pukul	:	11.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Martin Manurung, S.E., M.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	1. Relaksasi kredit bagi usaha kecil yang bisa diakses serta sinkronisasi UMKM melakukan <i>switch</i> bisnis terkait dengan dampak Covid-19, 2. Dan lain-lain.
Hadir	:	1. dari 53 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Dra. Victoria Br. Simanungkalit, MM., 3. Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Arif Rahman Hakim, 4. Plt. Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. Herustiati, 5. Plt. Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Ir. R.S. Hanung Harimba Rachman, S.E., 6. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Arief Mulyadi 7. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Virtual Komisi VI DPR RI pada pukul 11.08 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 22 April 2020, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, S.E., M.A.
3. Sehubungan dengan wabah virus Covid 19, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilakukan secara virtual.

II. KESIMPULAN

1. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk secara terus menerus memantau perkembangan dan memberikan pendampingan kepada UMKM dan Koperasi agar tetap mampu mempertahankan usaha/kegiatannya dan dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memiliki *database* sebagai basis pemetaan dan analisis kebijakan pendampingan dan penguatan UMKM/Koperasi selama masa Pandemi dan di masa depan serta memberikan data UMKM yang sehat dan sakit dengan tidak hanya mengandalkan data dari BPS dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Komisi VI DPR RI mendukung agar Kementerian Koperasi dan UKM untuk memiliki pusat data dan informasi (PUSDATIN).
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus mendorong Koperasi/UMKM agar mampu mencari terobosan dan inovasi selama masa Pandemi Covid-19.
4. Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Koperasi dan UKM membuat strategi dalam penyusunan kerja yang bersinergi dan terintegrasi dengan pelaku UMKM.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta LPDB untuk memanfaatkan dengan baik anggaran/*budget* Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun dengan memperhatikan *recruitment* dan kurikulumnya sehingga menghasilkan calon pekerja muda yang professional di masa yang akan datang untuk pembangunan Indonesia.
6. Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM serta LPDB untuk meningkatkan sosialisasi yang komprehensif terhadap program kerja yang dicanangkan kepada masyarakat.
7. Komisi VI DPR RI mendukung dan mendorong atas langkah yang diambil oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) untuk mengembangkan usaha berbasis *online* dengan memberikan pelatihan dan pendampingan ditengah Pandemi Covid-19.
8. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Restrukturisasi Usaha; Deputi Produksi dan Pemasaran; Deputi SDM; Deputi Pembiayaan; Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB-KUMKM untuk menggunakan seluruh potensinya dan meningkatkan kinerja dalam menghadapi Pandemi Covid-19.
9. Komisi VI DPR RI meminta ke PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui produk Mekaar dan Mekaar Syariah dengan aset yang sangat besar sekitar Rp 18 triliun, untuk memperlihatkan kiprahnya di tengah masyarakat serta melakukan evaluasi dan perbaikan program.

10. Komisi VI DPR RI meminta Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Direksi PT Permodalan Nasional Madani (Persero); dan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir/LPDB-KUMKM untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. **PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.02 WIB.

Jakarta, 22 April 2020

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**MARTIN MANURUNG, S.E., M.A.
A-352**